

Resolusi Jihad: Representatif Etos Agama dalam Perjuangan Ulama dan Santri untuk Kemerdekaan Indonesia

Tri Indah Annisa¹, Jarkasih², Nur Azizah³

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

E-mail: tri.tha@bsi.ac.id¹, jarkasih.jkh@bsi.ac.id², nur.nzh@bsi.ac.id³

Article History:

Received: 22 Januari 2026

Revised: 31 Januari 2026

Accepted: 03 Februari 2026

Keywords: Jihad Resolution, Ulama, Santri, Islamic Boarding School.

Abstract: *The Jihad Resolution is concrete evidence of the existence of a religious ethos that awakened the fighting spirit of the Indonesian people during the colonial era to expel colonialism in the land of the Indonesian nation. The jihad resolution represents the struggle carried out by ulama and santri to defend the homeland with pesantren as the headquarters of the Islamic struggle institutions of the past. Ulama and santri gathered in pesantren institutions have always been proactive and anticipatory religious institutions for the good of all components of the nation. The doctrine of nationalism held by ulama and santri gathered in pesantren in the Indonesian nation is in synergy with the doctrine of the embodiment of Islamic belief, namely hubbul waton minal iman (love of the country as a reflection of faith), therefore both ulama and santri always strive to place the interests of the nation and state above the interests of groups or groups.*

Kata Kunci: Resolusi Jihad, Ulama, Santri, Pesantren.

Abstrak: Resolusi Jihad merupakan bukti nyata dari adanya etos keagamaan yang membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia pada masa colonial untuk mengusir penjajahan di tanah bangsa Indonesia. Resolusi jihad merupakan representative perjuangan yang di lakukan oleh para ulama dan santri untuk membela tanah air dengan bermarkas pesantren menjadi lembaga perjuangan umat Islam waktu silam. Ulama dan santri yang terhimpun dalam lembaga pesantren selalu menjadi lembaga keagamaan yang proaktif dan antisipatif bagi kebaikan semua komponen bangsa. Doktrin sikap kebangsaan nasionalisme yang dimiliki ulama dan santri yang terhimpun di pesantren pada bangsa Indonesia disinegri dari doktrin perwujudan keyakinan Islam yaitu *hubbul waton minal iman* (cinta negara sebagai cerminan dari iman), oleh karenanya baik ulama dan santri selalu berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan kelompok atau golongan.

PENDAHULUAN

Pemikiran moderat dan kosmopolit yang hadir sejak awal dalam dunia dakwah Islam telah ternanam kuat sejak kedatangan Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Para pendakwah ini mengambil *policy* dakwah yang lebih mementingkan “substansi” dari para performa verbal dan priskriptif. Hal ini, karena dakwah Islam senantiasa didasari oleh penanaman nilai-nilai sufistik yang memang lebih mengedepankan aspek religiusitas yang mendalam.¹

Berimplikasi yang tampak dari pendekatan sufistik yang dipakai oleh Islam Indonesia ini sebagai pola ber-Islam masyarakat pesantren. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki keagamaan yang dari awal tidak malu-malu mengusung tradisi lokal. Karenanya, bangsa Indonesia selalu menampilkan wajah Islam yang khas lokal dan moderat yang membedakan Indonesia dengan negara lain keagamaan di dunia.

Karakter islam keindonesiaan bukanlah pada kekuasaannya, akan tetapi adalah menggarami kehidupan bangsa agar menjadi bangsa yang religius-filosofis. Strategi pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pendiri bangsa Indonesia tidak terduga untuk mengkotak-kotakkan warga-bangsa berdasarkan perbedaan suku, ras, budaya maupun agama. Sejak awalnya, para pendiri bangsa ini tidak memiliki ambisi terhadap kekuasaan akan tetapi yang menjadi cita-citanya adalah terwujudnya kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia yang berilmu, berakhlakul karimah dan menjadi pionir untuk mempertahankan keberadaan Indonesia sebagai negeri muslim (*muslim country*).²

Oleh sebab itu perlu diketahui secara mendalam pemikiran pembawaan peran etos agama yang khas oleh peran ulama dan santri sangat berpengaruh dalam berdirinya bangsa Indonesia yang merdeka yang memiliki karakter yang moderat dan toleran, sehingga bisa menjadi berbeda dengan negara muslim yang lain yang ada di dunia secara umum:

Dalam perjalanannya peran Ulama dan santri memfokuskan gerakannya selain ingin mendakwahkan agama Islam di tengah masyarakat Indonesia, ulama dan santri ingin mengabdikan dirinya untuk membantu bangsa Indonesia dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Oleh sebab itu pesantren sebagai lembaga Pendidikan menurut hal ini suatu yang penting dan pokok untuk dibahas dan diketahui. Oleh sebab itu, perlu untuk penulis memaparkan secara gamblang atas kontribusi ulama dan santri yang besar dalam gerakan pendidikan untuk mempertahankan eksistensi dan meraih kemerdekaan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode adalah rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses penelitian dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan metodologi penelitian yaitu sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan dengan suatu disiplin ilmu. Metode penelitian menggunakan kerangka yang telah tersistem, baik dalam bidang keilmuan maupun yang lain. Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

¹Said Aqil Siraj, *Wajah Islam di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Lihat Hilmi Muhammadiyah, Sulthan Fatoni, NU: *Identitas Islam Indonesia* (Jakarta: Elsas Jakarta, 2004), hal. ix.

²M Ridwan Lubis Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam artikel “*Keulamaan Dalam Kancan Modernitas*”.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³ Penelitian ini berusaha mengungkapkan informasi berupa data deskriptif mengenai rentetan sejarah dan pelaku sejarah mengenai sikap toleransi Muhammadiyah dalam membangun pendidikan di Indonesia. Sedangkan Metode Pengumpulan Data menggunakan Studi kepustakaan (*Library research*). Dan disini penulis menggunakan jenis data yang di bagi dua menjadi data primer dan sekunder, data primer yang digunakan disini yaitu dengan mengamati studi lapangan melihat ulama dan santri di pesantren yang ada di Indonesia dan disini yang lain ada sumber sekunder yang di dapat dari buku-buku perjuangan ulama dan santri dalam mengembangkan wawasan kebangsaan membela kemerdekaan Indonesia yang ditulis oleh akademisi yang ahli dibidangnya.

Teori dan Pendekatan

Pada dasarnya, teori adalah seperangkat gagasan atau konsep yang akan menjelaskan suatu hubungan fenomena-fenomena yang terjadi pada sebuah peristiwa. Yang mana bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. dengan demikian teori tidak pernah terlepas dari adanya unsur konsep, gagasan dan penjelesan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori utama sebagai jembatan untuk memahami dan menganalisis mengenai fenomena kejadian sejarah waktu itu seperti tokoh teori modern untuk menganalisis fenomena fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Teori fungsionalisme disebut juga teori strukturalisme fungsional. Fungsionalisme merupakan teori yang menekankan bahwa unsur-unsur di dalam suatu masyarakat atau kebudayaan itu saling bergantung dan menjadi kesatuan yang berfungsi sebagai doktrin atau ajaran yang menekankan manfaat kepraktisan atau hubungan fungsional. Istilah “fungsi” disini menunjukkan kepada sumbangan yang diberikan agama atau lembaga sosial yang lain untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berjalan terus menerus.⁴ Dengan demikian yang harus dilakukan yaitu dengan memberi perhatian lebih dengan melihat peranan yang telah, sedang dan masih dimainkan oleh organisasi kegamaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat.

Disisi yang lain dari teori di atas untuk menjelaskan fungsi dari peran ulama dan santri dalam memainkan kemerdekaan di Indonesia seperti: Ulama dalam beberapa masyarakat di Indonesia mendapat sebutan berbeda-beda, Jawa (kiai), Sunda (ajengan), Madura (bandara), Sumatera (syekh), mengukuhkan perannya dalam masyarakat dengan maknanya yang kadang tak terbatas. Pada pemahaman keIslaman (Indonesia) Dr. Greg Fealy menjelaskan, istilah kiai yang berkonotasi dalam makna spesifik ulama, sering menyebabkan bias di sana-sini. Kata kiai merujuk pada pengajar atau guru agama Islam yang tingkat keilmuannya kurang memadai, lebih mengandalkan karisma, garis keturunan, atau memiliki kekuatan spiritual untuk mendapatkan otoritas. keberadaan para ulama dilihat dari konsep kepemimpinan tidak hanya sekedar sebagai *ethical prophecy* yang memahami dan menghayati misi *risalah* akan tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah *exemplary prophecy* yaitu menunjukkan keteladanan beliau dalam tatacara menjalankan ajaran Islam. Sehingga dengan demikian, seorang ulama adalah merupakan saksi hidup yang bertugas melanjutkan proses internalisasi ajaran Islam sesuai dengan kesaksian mata rantai syari’ah (*syuhud ‘ain al syari’ah*). Kekuatan pribadi seorang ulama adalah terletak pada kesungguhan (*al juhd*) serta konsistensi (*al istiqamah*) mereka dalam menjalankan ajaran Islam

³Lexy J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2007), hal.. 4.

⁴ZulkarnainNasution, *Soladaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologis* (Malang: UMM Press, 2009), hal. 44.

yang terkadang harus mengorbankan kepentingan pribadinya untuk merawat kebutuhan umat.⁵

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan tersebut adalah: Pendekatan Sosiologis untuk melihat kondisi sosial yang terjadi dalam interaksi organisasi muhammadiyah dalam kiprahnya di Indonesia yang fokusnya pada interaksi agama dan masyarakat. Disisi yang lain penulis juga menggunakan Pendekatan Historis. Pendekatan Historis adalah suatu pendekatan untuk menelusuri asal-usul, dan pertumbuhan agar serta institusi-institusi keagamaan dalam periode-periode perkembangannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Yang dengan konsep-konsep tentang pengalaman keagamaan dapat dihargai dan dipahami maka gambaran-gambaran utuh mengenai suatu agama akan dapat dicapai.⁶

Menulis suatu sejarah menurut Media Zainul Bahri berarti merekonstruksi suatu episode atau kejadian masa lalu untuk dihadirkan masa kini, untuk dipertanyakan, dilihat relevansi dan kepentingan dengan masa kini.⁷ Dan Menurut Mercea Eliade bahwa ketika seseorang ingin memahami agama, harus memahami fakta keagamaan, haruslah ia mencoba memahami sifat historisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ulama di Indonesia

Ulama dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai kedalaman *ma'rifatullah* dan ilmu syariah dalam arti yang luas ataupun ilmu kauniyah. Artinya, ulama⁸ merupakan orang-orang yang sangat dalam pengetahuannya tentang ayat-ayat yang tersurat maupun tersirat (ayat *kauniyah* dan ayat *kauniyah*). Ulama dapat dikenal melalui kriteria yang dimiliki sebagai berikut: pertama, kedalaman marifat kepada Allah swt., seperti mempunyai ilmu yang dalam, tingkat ketaqwaan yang tinggi, amal sholehnya banyak, dan berakhlak mulia; kedua, kedalaman ilmu syariah dalam arti luas, yang meliputi ilmu akidah, ilmu hukum, dan ilmu akhlak; ketiga, kedalaman pengetahuan tentang ayat-ayat *kauniyah*, yakni ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengetahuan empiris dan eksperimen.⁹

Peranan ulama dalam dinamika umat dapat dipahami dan didekati dari tiga bentuk kriteria

⁵M Ridwan Lubis Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam artikel “*Pasang Surut Peranan Ulama*”

⁶Mujahid Abdul Manaf, *Ilmu Perbandingan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal.28.

⁷Media Zainul Bahri, *wajah Studi Agama-agama Dari Era Teosofi Indonesia (1901-1940) Hingga masa Refomasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.16.

⁸Ulama dalam beberapa masyarakat di Indonesia mendapat sebutan berbeda-beda, jawa (kiai), Sunda (ajengan), Madura (bandara), Sumatera (syekh), mengukuhkan perannya dalam masyarakat dengan maknanya yang kadang tak terbatas. Pada pemahaman keIslaman (Indonesia) Dr. Greg Fealy menjelaskan, istilah kiai yang berkonotasi dalam makna spesifik ulama, sering menyebabkan bias di sana-sini. Kata kiai merujuk pada pengajar atau guru agama Islam yang tingkat keilmuannya kurang memadai, lebih mengandalkan karisma, garis keturunan, atau memiliki kekuatan spiritual untuk mendapatkan otoritas. Lihat, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967, 2003, hal 22-23. Disisi yang lain tugas ulama dan intelektual agama adalah terus-menerus melakukan sikap oposisi, yaitu melakukan kritik terhadap apa pun yang dianggap perlu dikritik karena oposisional merupakan kata kunci dari fungsi ulama. Maka, gegar atau tapak ulama melalui fatwa-fatwanya harus mengambil jarak dari dogma tertentu serta struktur kekuasaan yang menyebabkan pudarnya sikap kritis. Lihat Komarudin Hidayat & Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama: Tafsir Kepemimpinan Era Reformasi dan Dialektika Ulama-Negara*, 2004, hal. 14. Lihat pula Ahmad Syubbanuddin Alwy, “Nahdlatul Umum”, Binhad Nurrohmah, ed., *Dari Kiai Kampung ke NU Miring: Aneka Suara Nahdliyyin dari Beragam Penjuru* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 121.

⁹Ajmun Abdurrahman, “Profil Ulama”, dalam *Berita Resmi Muhammadiyah: Menyambut Mukhtamar Muhammadiyah ke 43 di Banda Aceh 6-10 Juli 1995* (BRM No. 25/1990-1995 Muharram 1416/Juni 1995), hal. 14-15.

ulama sebagai berikut: *Pertama*, ulama adalah pewaris nabi seperti disebut dalam hadis “*wa annl ulamaahum warastatul ambiya*” sesungguhnya ulama itu adalah pewaris nabi. Maksudnya, ulama diperlukan oleh setiap masyarakat dan organisasi keagamaan karena sesungguhnya ulama itu mewarisi risalah-risalah suci yang dibawa oleh para nabi. Untuk itu, perlu adanya figur seorang ulama sebagai media transformasi nilai-nilai kesucian karena mereka tidak mempunyai ambisi politik, jabatan, dan lain-lain. Mereka ikhlas dalam beramal. *Kedua*, ulama adalah sumber teladan (*uswatun hasanah*) bagi setiap masyarakat. *Ketiga*, ulama adalah pemberi informasi yang jelas dapat membawa umat kepada kebenaran dan kesejahteraan.¹⁰

Oleh karena itu, keberadaan para ulama dilihat dari konsep kepemimpinan tidak hanya sekedar sebagai *ethical prophecy* yang memahami dan menghayati misi *risalah* akan tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah *exemplary prophecy* yaitu menunjukkan keteladanan beliau dalam tatacara menjalankan ajaran Islam. Sehingga dengan demikian, seorang ulama adalah merupakan saksi hidup yang bertugas melanjutkan proses internalisasi ajaran Islam sesuai dengan kesaksian mata rantai syari'ah (*syuhud 'ain al syari'ah*). Kekuatan pribadi seorang ulama adalah terletak pada kesungguhan (*al juhd*) serta konsistensi (*al istiqamah*) mereka dalam menjalankan ajaran Islam yang terkadang harus mengorbankan kepentingan pribadinya untuk merawat kebutuhan umat.¹¹

Kalau demikian, bahwa figur ulama merupakan sosok yang penting keberadaannya ditengah masyarakat dan begitu penting pula dalam keberadaannya di lembaga organisasi. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang bermayoritas muslim mempercayai bahwa ulama memiliki peran besar bagi peradaban Islam di masa depan. Ulama sangat diperlukan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensinya di Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia dikenal sebagai mayoritas penduduk muslim terbesar dan memiliki banyak sekali ulama yang memiliki tauladan yang baik. Ulama diposisikan sebagai pribadi yang tulus dan ikhlas dalam berbuat untuk umat dan bangsa yang bisa membawa kepada sebuah perubahan masyarakat menjadi masyarakat yang taat. Disinilah letak pentingnya eksistensi ulama dalam sejumlah karakter yang dimilikinya. Sebagaimana al-Qardhawi katakan, “keberadaan ulama di tengah-tengah umat memang dibutuhkan. Merekalah yang berani menyampaikan kebenaran dengan kearifan, menolak kemungkaran dengan penuh kesabaran, menyatakan ketegasan dengan penuh keteguhan, dan menerima kehidupan sederhana dengan penuh keridhoan¹².” Dikatakannya pula bahwa ulama adalah pelita hidayah, pengawal keadilan, pelindung rakyat dan pemberi petunjuk kepada umara, raja, dan kepala Negara.¹³

Menurut prof. Ridwan Lubis dalam artikelnya yang berjudul “*Keulamaan Dalam Kancan Modernitas*” menyatakan bahwa ulama memiliki empat komponen untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam yaitu argumen rasional-suprasional; integrasi empiris, profetik dan eskatologis. Argumen rasional-suprarasional adalah memberikan penjelasan tentang makna wahyu baik melalui penjelasan secara akal maupun diatas akal sehingga informasi kewahyuan sebagai kebenaran yang didasarkan kepada pertimbangan akal dan di atas akal. Argumen integrasi empiris adalah bahwa para ulama mampu menjelaskan kebenaran ajaran Islam secara holistik baik dalam ucapan, penghayatan dan perbuatan sehingga kebenaran ajaran Islam dapat

¹⁰Ajmundi Abdurrahman, “Profil Ulama”, dalam *Berita Resmi Muhammadiyah: Menyambut Muktamar Muhammadiyah ke 43 di Banda Aceh 6-10 Juli 1995*, hal. 15.

¹¹M Ridwan Lubis Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam artikel “*Pasang Surut Peranan Ulama*”

¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Syariat Islam Ditantang Zaman*, Terjemahan (Bandung: Mizan, 1994), hal. 52.

¹³Yusuf Al-Qardhawi, *Syariat Islam Ditantang Zaman*, Terjemahan, hal. 52.

dirasakan oleh setiap orang melalui kekuatan nalarnya. Argumen profetik adalah ulama menjelaskan tentang berbagai ramalan tentang masa depan kehidupan yang akan dihadapi umat manusia. Terakhir, eskatologis adalah menerangkan bahwa kehidupan di dunia adalah sekedar perhentian sementara ¹⁴dan setelah itu akan menempuh perjalanan panjang yaitu alam akhirat menuju tempat pembalasan segala perbuatan manusia. Demikianlah gambaran kepribadian yang dimiliki seorang ulama pada masa lalu sehingga tidak mengherankan apabila mereka selalu dijadikan umat sebagai rujukan dalam mengikuti seluruh prosesi perjalanan kehidupan (*marja' al taqlid*) dalam mengikuti tuntutan syariah. Karena pada dasarnya Ulama diyakini yang membawa paham keagamaan, maka ulama sebagai matarantai pembawa faham Islam ahlussunnah wal jama'ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya di kehidupan dunia.¹⁵

Dalam konteks ke indonesiaan ulama taupun kyai merupakan tokoh penting dan sentral yang memainkan peran yang sangat fundamental dalam merekonstruksi suatu pergerakan internal ataupun eksternal dalam gerakan sosial bahkan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Kyai maupun ulama memiliki pengaruh dalam membentuk konstruksi Negara dan bahkan ikut terlibat dalam persoalan politik yang memiliki konstruksi dalam memainkan perannya dalam politik., yang mana mengantarkan Indonesia dalam mengembangkan wacana berpolitik secara budaya (*civil society*).

Dalam posisi yang seperti itulah, para ulama berhasil menghimpun komitmen dari umat yang berada dalam wilayah kewibawaannya, Hal itu disebabkan karena semua gerak langkah ulama selalu berangkat dari motivasi dakwah menuju kepada rida ilahi. Dalam kaitan itulah seorang ulama tanpa melalui rekayasa *setting* sosial, secara reflektif terhimpun wibawa pada dirinya sehingga mereka tampil menjadi figur referensi sosial yang dalam terminologi ilmu-ilmu sosial disebut dengan perantara budaya (*cultural broker*). Artinya tidak ada perubahan budaya yang terjadi tanpa legitimasi mereka. Apabila ditelusuri faktor kekuatan yang membuat mereka memiliki kepribadian yang kokoh serta disegani baik kawan maupun lawan, terletak pada kemandirian sikap dan pribadi mereka dari segala pernik-pernik kehidupan duniawi termasuk kekayaan dan kekuasaan.¹⁶ Dengan merujuk kepada Alquran dan sifat-sifat para nabi, maka peranan ulama semata-mata bertujuan untuk membangun kehidupan yang layak (*islah*) di muka bumi sepanjang kemampuan mereka.¹⁷

Dalam perjalanan keberadannya Ulama di Indonesia, sosial keagamaan kyai ataupun ulama memiliki peran yang penting dalam bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan hingga sekarang. Hubungan antara NU dan Negara menunjukkan konsep yang menarik. NU sebagai gerakan jam'iyah yang berbasis massa pedesaan ini berada diluar pemerintahan, sekarang bukan saja masuk di dalam pemerintahan, tetapi justru mengendalikannya dari depan. Ulama sebagai kepercayaan masyarakat memainkan kontrol sosial serta aktif dalam mengembangkan bangunan *civil society*. Adapun alasan ulama masuk dan mengendalikan pemerintahan (control sosial) yaitu ingin menjadikan politik di Indonesia memiliki wawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin,

¹⁴M Ridwan Lubis Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam artikel "Keulamaan Dalam Kancan Modernitas".

¹⁵Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal. 253.

¹⁶M Ridwan Lubis Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam artikel "Pasang Surut Peranan Ulama"

¹⁷Q.S. Hud: 11: 88.

dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju ke bahagian di dunia dan kehidupan akhirat.¹⁸

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa harus disadari keberadaan ulama ataupun kiai memang merupakan hal yang penting karena posisi ulama di Indonesia bukan saja memainkan perannya sebagai seorang pendidik agama ataupun spiritual bahkan peran kyai juga di butuhkan untuk menjaga kestabilan bangsa Indonesia dalam berbagai segi bidang. Pada hakekatnya, terikatnya di dalamnya semua unsur yang membentuk bangunan masyarakat, di mana ulama (kiai) menjadi pusatnya. Pesantren dengan tradisi yang dibentuknya, dalam jangka panjang akan menjadi lembaga yang mempunyai peranan dalam perkembangan Islam di Indonesia, maupun di Negara-negara Islam pada umumnya. Oleh sebab itu, peran ulama ataupun pesantren sangat dibutuhkan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia taupun dalam mengajarkan dan menebarkan perdamaian dan toleransi.

Peran Santri dan Pondok Pesantren dalam Perjuangan Bangsa Indonesia

Pesantren adalah lembaga lokal yang mengajarkan praktik-praktik dan kepercayaan-kepercayaan Islam. Pesantren merupakan pengembangan sistem *halaqah* yang di dalamnya para murid harus mondok dan hidup dalam *zawiyah* (kamar penyepian) syaikhnya (guru tarekat). Dari pesantren ini kemudian timbul komunitas yaitu masyarakat yang mempunyai karakter dan tradisi pesantren sebagai akibat interaksi mereka dengan komunitas pesantren. Hal ini terjadi karena pengaruh pesantren cukup kuat. pesantren adalah milik bangsa Indonesia yang paling monumental yang harus dilindungi dan dipelihara perkembangannya.

Jika berbicara tentang kekuatan pesantren maka dapat diuraikan bahwa kekuatan tersebut tidak lain pengaruh dari figur kiai sebagai titik sentral komunitas pesantren. Kiai adalah cendekiawan agama (ulama) yang karena Islam tidak memiliki sistem kependekatan, menjadi pemimpin-pemimpin Islam di Jawa. Kiai tidak memperoleh gelar dari pendidikan formal, tetapi lebih dari itu, gelar itu datang dari masyarakat. Sejak zaman Majapahit para kiai sangat ditaati para santri dan dimuliakan laksanakan raja-raja lokal tak bermahkota.¹⁹ Figur kiai yang begitu kuat dan penguasanya terhadap ilmu pengetahuan agama menjadikan pesantren memainkan perannya sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren memposisikan dirinya sebagai lembaga multifungsi. Pesantren tidak hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan tetapi juga sentrum perubahan budaya lokal sekaligus benteng terakhir kebudayaan masyarakat muslim perdesaan.

Pesantren yang semula berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, kemudian meningkat menjadi lembaga perjuangan Islam. Segala usaha dan perjuangan untuk memajukan dan mengembangkan Islam bermarkas di pesantren, di bawah kepemimpinan kiai pengasuh pesantren. Sebagai markas kepemimpinan perjuangan, pesantren juga menjadi tempat pelayanan masyarakat, yang ikut berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang material maupun yang spiritual, rohani dan jasmani. Oleh sebab itu pesantren juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan masyarakat.²⁰

Pesantren merupakan identitas murni yang dimiliki Indonesia. Pesantren pada jaman penjajahan memainkan peran-peran yang unik, khususnya para kiai dalam perjuangan melawan

¹⁸Pesan-pesan Mukhtar NU Ke XXVII mengenai Masalah-masalah Masyarakat, Bangsa dan Negara. Dikutip dari lampiran II buku Kacung Marjani, Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 283.

¹⁹Simuh, "Islam dan Pergumulan Budaya Jawa," (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 133. Lihat pula Hilmi Muhammadiyah, Sulthan Fatoni, *NU: Identitas Islam Indonesia* (Jakarta: Elsas Jakarta, 2004), hal. 110.

²⁰Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista: 2006), hal. 4.

penjajahan. Keberadaan pesantren menjadi sebuah usaha dan upaya sebagai bentuk perlawanan terhadap colonial penjajahan di Indonesia. Yang mana orang-orang pesantren memiliki kesadaran bahwa kolonial merupakan “pemerintah kafir” yang menjajah agama dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat pesantren menggunakan kekuatan pesantren sebagai peran melawan penjajahan di Indonesia.

Peran pesantren bukan saja sebagai perlawanan mengusir penjajahan di tanah Indonesia melainkan juga memiliki peran perlawanan kultural. Dalam hal perlawanan kultural ini pesantren membuat sebuah jaringan kultural untuk membendung arus kebudayaan barat yang dibawa oleh para kolonial seperti Belanda, Jepang dan lain-lain. Pesantren sebagai basis kultural bangsa Indonesia, selalu berusaha memberikan kontribusi untuk mencetak santri-santri dengan diajarkan tauladan yang baik (*uswatun hasanah*) bagaimana mereka nanti berhubungan dengan orang lain dengan diterapkan berbagai sikap toleransi sehingga terhindar dari sikap radikal ataupun ekstrim ketika berhadapan dengan pihak lain.

Dapat disimpulkan bahwa lembaga pesantren sejak dulu bukan saja sebagai tempat pendidikan keagamaan, tetapi pesantren yang didirikan sebagai tempat perjuangan yang mana ikut serta dalam membangun dan mendirikan bangsa Indonesia. dan di pesantren pula sebagai tempat pelayanan masyarakat dan pembinaan karakter sehingga nantinya ketika mereka keluar dari pesantren bisa menjadi pribadi yang baik dan tetap menjadi kader bangsa yang membangun bangsa Indonesia yang maju.

Resolusi Jihad: Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Membela Negara

Membicarakan Negara selalu dimulai dengan sebuah perbincangan yang menarik jika isu yang di perbincangkan berkaitan dengan masalah agama. Dalam konteks Resolusi Jihad sebagai nilai juang kebangsaan memiliki pembahasan yang menarik antara hubungan Negara dan agama. Resolusi jihad memiliki sebuah pemahaman bahwa agama dan Negara memiliki relasi hubungan yang luar biasa dalam kaitannya konteks keIndonesiaan yang pluralistik. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama melihat Negara Indonesia tak ubahnya seperti melihat kota madina yang di mana hubungannya seperti awal kepemimpinan Rosulullah yang memiliki beragam etnik, budaya, dan pemeluk agama yang berbeda-beda. Bangunan kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kalangan Islam salah satunya peran ulama dan santri dalam membangun dan meraih kemerdekaan sebagai bentuk relasi bangsa dan agama. Hubungan antara ulama dan santri dengan Negara menunjukkan konsep yang menarik. Yang mana ulama dan santri memainkan peran yang memiliki massa ini berada diluar pemerintahan, sekarang bukan saja masuk di dalam pemerintahan, tetapi justru mengendalikannya dari depan.

Disini dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika umat Islam menunjukkan adanya kolerasi antara isu sosial politik dengan teks keagamaan (teologi). KeIslaman dan keIndonesiaan merupakan dua hal yang takterpisahkan satu sama lain. Sejak zaman perjuangan, NU bersama elemen bangsa yang lain, para ulama dan santri terutama yang terhimpun dalam NU turut aktif merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut NU bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final dan mengikat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. NU sebagai organisasi keIslaman yang dimasuki oleh Umat Islam sebagai bagaian terbesar wajib memelihara keutuhan NKRI. Hal ini sebagai bukti sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Di Indonesia sikap nasionalisme muncul karena adanya semangat perlawanan terhadap penjajahan. Sikap nasionalisme muncul karena adanya kepentingan bersama dalam urgensi sejarah yang sama yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Hal ini dapat menjadi satu ikatan bersama dalam

menguukuhkan sika nsionalisme dan patrionalisme atas bangsa Indonesia.

Oleh karena, kekuatan pesantren ulama dan santri yang terhimpun dari NU memiliki ideologi kebangsaan kepada tanah air dengan perjuangan *amar ma'ruf nahi munkar* dan perjuangan *lil-I'lai kalimatillah* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan mewujudkan sikap berpolitik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik. Politik kebangsaan berarti masyarakat Indonesia ataupun warga NU harus istiqomah dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final Negara bagi bangsa Indonesia. Politik kerakyatan maksudnya warga NU dan segenap masyarakat harus aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat, melindungi dan membela rakyat dari pihak yang sewenang-wenang. Dan yang terpenting yaitu Etika berpolitik yang harus selalu ditanamkan agar belangsung kehidupam politik yang santun dan bermoral yang tidak menghalalkan segala cara. Sehingga terwujudnya Negara *baladun toyyibatun wa robbun ghafur*.²¹

Islam memandang konsep kebangsaan selalu berkaitan dengan bentuk sebuah perjuangan melalui politik. Hal itu tidak ubahnya peran ulama dan santri yang terhimpun dalam NU berkecimpung dalam ranah politik. Salah satunya yaitu menyakini bahwa nilai keIndonesian itu terwujud di dalam Pancasila. Pancasila merupakan pandangan dunia (*weltanschauung*) masyarakat Indonesia yang menjadi dasar filosofis. Pada hal ini Pancasila merupakan falsafah masyarakat nusantara di mana kebaikan, keluhuran, kepantasan, dan ketidakpantasan didasarkan padanya. Sifat Pancasila sebagai dasar filosofis ini membuatnya menjadi dasar Negara dengan berperan sebagai *Staatsfundamentalnorm*: dasar normative bagi hukum positif. Dengan demikian nilai-nilai keIndonesiaan adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Hal ini menandakan bahwa ada pertemuan makna antara nilai keIslaman dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila sangat cocok mendasari pembangunan di Indonesia karena nilai Islam bertemu dengan nilai kebangsaan.

Persembahan kalangan Islam dalam perwujudan kebangsaan Indonesia dibuktikan dari peran aktif ulama dan santri sehingga terwujudnya pergerakan perjuangan menegakkan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Salah satunya dikumandangkannya perintah resolusi jihad sebagai bentuk perjuangan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Peran santri dan ulama yang terhimpun dalam NU maju bahu membahu dengan kalangan lain terutama tentara Negara berupaya menegakkan, membela dan mempertahankan Negara Indonesia. Ini sebagai bukti sikap patriotisme dan loyalitas para ulama dan santri yang terhimpun dalam NU sebagai wujud upaya dan usaha dalam menjaga Indonesia dan membela bangsa Indonesia dari ancaman bangsa lain.²²

Membicarakan tentang hubungan konsep kebangsaan kalangan NU ataupun masyarakat Islam maka berkaitan dengan sikap nasionalisme dan patrionalisme. Sikap kebangsaan nasionalisme dan patrionalisme merupakan sebuah bentuk keharusan dan perintah dalam agama untuk membela tanah air sebagai bentuk perjuangan mempertahankan eksistensi bangsa. sikap NU yang telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Laskar Hizbullah dan Laskar Sabillillah menjadi bukti historis yang tidak terbantahkan

²¹KH. M.A. Sahal Mahfudh, "Pengantar Politik Kebangsaan Ulama", lihat pada buku Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949 (Ciputat: Pustaka Kompas, 2014), hal. Xxiv.

²²H. As'ad Said Ali, Pengantar Harmonisasi KeIslaman dan KeIndonesian. lihat pada buku Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949 (Ciputat: Pustaka Kompas, 2014), hal. Xxviii.

dalam membela bangsa Indonesia. Mereka terlibat secara intens dalam proses terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan serta para kyai dalam membakar semangat dan moril terlihat berusaha memaknai perjuangan membela tanah air sebagai suatu . sebuah Fatwa Jihad, terlebih dahulu sebelum lahirnya resolusi jihad yang diputuskan lewat rapat kyai di Surabaya. Fatwa yang diringkaskannya dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat pada 20 November 1945, ditandatangani Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari pada 17 September 1945.

Fatwa tersebut di antaranya berbunyi: (1) hukumnya memerangi orag kafir yang merintang kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardlu 'ain bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin meskipun bagi orang kafir; (2) hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid; (3) hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh.²³

Berpijak dari fatwa jihad ini, kemudian dikukuhkan oleh sebuah rapat para kyai pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Mereka adalah para perwakilan Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura berkumpul di Kantor Hofdsbestuur Nahdlatul Ulama. Di tempat inilah, para kyai berkesempatan untuk membahas situasi perjuangan dan membicarakan uaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diakhir pertemuan tersebut, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan sebuah Resolusi Jihad sekaligus mengutakan Fatwa Jihad Rais Akbar NU, KH, Hasyim Asy'ari.²⁴

Para kyai dan santri khususnya yang terhimpun dalam Nahdlatul Ulama (NU) punya peran dan jasa yang besar dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari perjuangan yang diperankan oleh para kyai NU generasi awal dalam mengusir penjajah. Didirikannya NU selain untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi atau paham *Islam Ala Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, juga penuh semangat kebangsaan, yakni untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Yaitu dikeluarkannya perintah resolusi jihad yang dicetuskan tidak lepas dari kerangka sikap nasionalisme peran kyai dan santri. Karena resolusi jihad tersebut sebagai bentuk menegakkan Negara Republik Indonesia dan agama Islam.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sikap kebangsaan nasionalisme NU dibuktikan dari masa perjuangan revolusi kemerdekaan, yang diwujudkan dari sikap para ulama dan santri dalam meletakkan kepentingan bangsa dan Negara jauh lebih penting. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika pada masa sekarang NU tetap dan akan mempertahankan empat pilar kebangsaan Indonesia yaitu: NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Kebhinekaan. Ini sebagai bentuk bukti peran NU memiliki sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Dan menandakan bahwa antara Islam dan sikap nasionalisme saling mengisi dan melengkapi bahkan terbukti mampu menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Doktrin sikap kebangsaan nasionalisme yang dimiliki ulama dan santri yang terhimpun oleh Nahdlatul Ulama pada bangsa Indonesia disinegri dari doktrin perwujudan keyakinan Islam yaitu *hubbul waton minal iman* (cinta negara sebgai cerminan dari iman), oleh karenanya NU selalu berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Hal ini yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara warga NU.

²³Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949 , hal. 205.

²⁴Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949 , hal. 205.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan penting yang berhasil dicapai dari penelitian ini yang disajikan dalam tulisan ini, sebagai berikut:

Bahwa Ulama dan Santri yang terhimpun dalam pesantren di Indonesia memiliki bukti yang nyata dalam memainkan peran yang instrumental dalam meraih kemerdekaan di Indonesia yang tidak dapat terbantahkan. Bukti peran tersebut dari adanya perintah fatwa *fardu 'ain* dari resolusi jihad sebagai perjuangan dalam melawan penjajahan untuk mengusir kolonialisme di Indonesia sehingga kemerdekaan dapat diraih oleh bangsa Indonesia.

Disisi yang lain, baik ulama dan santri di Indonesia pula berhasil memainkan sumbangsuhnya dalam menjaga stabilitas kerukunan dan keharmonian di Indonesia. dengan adanya sikap toleransi sebagai syarat menjaga bangsa Indonesia yang plural ini. Berbagai peran dan upayanya dalam mencapai kehidupan yang harmonis di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah fakta yang tidak dapat ditolak dan tak terbantahkan.

Pesantren yang sebagaimana tempat berkumpulnya para ulama dan santri sebagai lembaga masyarakat yang berbasis keagamaan selalu menempatkan diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan (*al-ukhuwwah*), toleransi (*al-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang memepunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa indonesia yang sejahtera sebuah fakta yang tidak dapat dibantahkan. Dari banyaknya bukti-bukti nyata yang konkrit dilakukannya seperti perjuangan melawan penjajahan di Indonesia.

Oleh sebab itu baik ulama dan santri yang terhimpun dalam lembaga pesantren selalu menjadi lembaga keagamaan yang proaktif dan antisipatif bagi kebaikan semua komponen bangsa. Doktrin sikap kebangsaan nasionalisme yang dimiliki ulama dan santri yang terhimpun di pesantren pada bangsa Indonesia disinegri dari doktrin perwujudan keyakinan Islam yaitu *hubbul waton minal iman* (cinta negara sebagaian cerminan dari iman), oleh karenanya baik ulama dan santri salalu berupaya meletakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan kelompok atau golongan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, Ajmuni. "Profil Ulama", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah: Menyambut Muktamar Muhammadiyah ke 43 di Banda Aceh 6-10 Juli 1995*. BRM No. 25/1990-1995 Muharram 1416/Juni 1995.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Syariat Islam Ditantang Zaman*, Terjemahan. Bandung: Mizan. 1994.
- Alwy, Ahmad Syubbanuddin. "Nahdlatul Umum", Binhad Nurrohmat, ed., *Dari Kiai Kampung ke NU Miring: Aneka Suara Nahdliyyin dari Beragam Penjuru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2010.
- Bizawie, Zainul Milal. *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949*. Ciputat: Pustaka Kompas 2014.
- Manaf, Mujahid Abdul. *Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Media Zainul Bahri, *wajah Studi Agama-agama Dari Era Teosofi Indonesia (1901-1940) Hingga masa Refomasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Meolong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya. 2007.

-
- Muhammadiyah, Hilmi & Sulthan Fatoni, *NU: Identitas Islam Indonesia*. Jakarta: Elsas Jakarta. 2004.
- Muzadi, KH. Abdul Muchith. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista: 2006.
- Nasution, Zulkarnain. *Soladaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologis*. Malang: UMM Press. 2009.
- Simuh, "Islam dan Pergumulan Budaya Jawa,". Jakarta: Teraju. 2003.
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*. Yogyakarta: LkiS. 2010.

Artikel/ Koran

- Lubis, M Ridwan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam artikel "Keulamaan Dalam Kancan Mordernitas". *Waspada*, 04 Februari 2019.
- Lubis, M Ridwan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam artikel "*Pasang Surut Peranan Ulama*", Tidak di Terbitkan.